

PENGARUH ASPEK IMPLEMENTASI DAN ASPEK MANFAAT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP NILAI KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Rukmi Juwita

Politeknik Pos Indonesia
witawilanggana@rocketmail.com

Resya Ayu Syamara P.A.Y

Politeknik Pos Indonesia
resya.ayu.syamara@gmail.com

***Abstract:** Bureau of Finance and the State Property in the National Land Agency of the Republic of Indonesia is a unit that includes most of the financial activities of BPN. In the assessment the value performance of BPN can be provided by using Aspect of Implementation and Aspect of Benefits in the implementation of the budget. Therefore, with reference to the Ministry of Finance Regulation No. 249 / PMK.02 / 2011, researchers conducted a study of the influence of the Aspect of Implementation and Aspect of Benefits (Independent Variable/ X_2) of the Performance Value (Dependent Variable/ Y) of BPN. The method used in this research is associative method. The result is the value of T for 16,318 of Implementation Aspects and 244 of Benefits Aspects. With the significant benefits of 0,000 for both. While the F value of the research is 1223.233. From these results it can be concluded that the implementation aspect and the aspect of benefits have a positive and significant effect partially to Value Performance. Aspects of Implementation and Benefits aspects together have a positive and significant effect on the performance value.*

***Keywords:** Implementation Aspects, Benefits Aspects, Performance Value*

Abstrak: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan unit yang didalamnya sebagian besar kegiatan keuangan BPN dilakukan. Dalam penilaian Nilai Kinerja BPN dapat dilakukan dengan menggunakan Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 peneliti melakukan penelitian terhadap pengaruh dari Aspek Implementasi (Variabel Independen/ X_1) dan Aspek Manfaat (Variabel Dependen/ X_2) terhadap Nilai Kinerja (Variabel Dependen/ Y) BPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dan deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah anggaran untuk tahun 2005-2025 dan sampelnya adalah anggaran 2011-2015. Dari hasil penelitian didapat nilai T untuk Aspek Implementasi sebesar 16,318 dan untuk Aspek Manfaat sebesar 244. Dengan signifikan sebesar 0,000 untuk keduanya. Sedangkan nilai F dari hasil penelitian adalah 1223,233. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap Nilai Kinerja. Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja.

Kata Kunci: Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, Nilai Kinerja

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan tuntutan reformasi yang semakin meningkat, saat ini akuntansi memiliki peran penting sebagai alat pencatatan. Pencatatan ini tidak hanya diperuntukan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi digunakan juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang bersangkutan. Dalam dunia bisnis akuntansi akan berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis tersebut. Hal inilah yang menyebabkan akuntansi mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan zaman.

Namun, untuk akuntansi pemerintahan tidak mengalami perkembangan secepat perkembangan akuntansi bisnis. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari akuntansi pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan. Akuntansi pemerintahan menjadi sangat penting dikarenakan tuntutan masyarakat. Menurut Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:43) “Terlebih adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada undang-undang ini badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberi dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya.”

Sebagai salah satu badan publik maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi publik. Salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2010-2014. Menurut Renstra untuk tahun 2010-2014 ini menyatakan bahwa masa tahun 2010-2014 adalah tahap ke II dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJM Nasional tahap ke II ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk tahun 2005-2025.

Salah satu biro atau bagian dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Dimana di bagian inilah sebagian besar kegiatan keuangan yang berhubungan BPN RI dilakukan. Sehingga penelitian ini mengambil tempat penelitian di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sebagai masyarakat yang demokratis, kita pasti ingin tahu sejauh mana dan bagaimana nilai kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan Renstra untuk tahun 2011-2015. Renstra 2010-2014 tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga untuk setiap tahun anggaran dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga pada tanggal 28 Desember 2011. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (4) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 diatur tata cara dalam evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas ini bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas

penggunaan anggaran yang dikelola oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun anggaran sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja ditahun-tahun berikutnya. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 kita dapat mengetahui nilai kinerja suatu Kementerian/Lembaga. Informasi yang didapat dari evaluasi nilai kinerja ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk tahun yang akan datang.

Sepanjang tahun 2010-2014 pemerintah beberapa kali melakukan perubahan kebijakan. Dimana perubahan kebijakan ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 untuk mengetahui nilai kinerja dari Badan Pertanahan Nasional kita dapat menggunakan aspek implementasi dan aspek manfaat dalam pelaksanaan anggaran.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Menurut Moh Mahsun, dkk (2013:115) "Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan." Menurut PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan revisi 2009 tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan.

2.2 Rencana Kerja Anggaran

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan RKA-K/L dilakukan sehubungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun anggaran yang bersangkutan. Moh Mahsun, dkk (2013:79) mengatakan bahwa:

RKA (Rencana Kerja Anggaran) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu satuan kerja pemerintah dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

2.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. DIPA disusun dalam rangka pelaksanaan APBN. DIPA disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DIPA berlaku untuk satu (1) tahun anggaran. Dalam DIPA memuat informasi mengenai satuan kerja dan dasar dari suatu pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pagu yang ada dalam DIPA merupakan batasan pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Surat Perintah Pencairan Dana

Menurut kppnwates.net Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

2.5 Kinerja

Menurut Moh Mahsun, dkk (2013:141) “Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.” Kinerja dari suatu organisasi hanya dapat diketahui jika organisasi tersebut sudah memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Istilah kinerja sendiri dapat digunakan untuk menyebut suatu prestasi atau keberhasilan suatu individu atau kelompok. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas adalah kinerja dari suatu organisasi.

2.6 Anggaran Pemerintah

Menurut Nurmala Hasanah, dkk (2016:129) “Anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.” Di Indonesia, Pemerintah menetapkan anggarannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga diterbitkan pada 28 Desember 2011. Peraturan ini keluaran sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah no 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

a. Pengukuran Aspek Implementasi

Aspek implementasi merupakan informasi yang berisi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.

- 1) Pengukuran Penyerapan Anggaran (P), hal ini dilakukan untuk menilai seberapa besar anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah terlaksana

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan Anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja

PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja

- 2) Pengukuran Konsistensi (K), hal ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang direpresentasikan dengan ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulannya

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RA : realisasi anggaran seluruh satuan kerja

RPD : rencana penarikan dana seluruh satuan kerja

n : jumlah bulan

- 3) Pengukuran Pencapaian Keluaran (PK), hal ini dilakukan untuk mengetahui ukuran produk barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang sudah terlaksana.

$$PK = \frac{\left(\frac{RVK \text{ ke } i}{RVK \text{ ke } i} \times \frac{\sum_{j=1}^m \frac{RKKi \text{ ke } j}{TKKi \text{ ke } j}}{m} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

PK : pencapaian keluaran

RVK : realisasi volume keluaran

TVK : target volume keluaran

n : jumlah jenis keularan

RKKi : realisasi indikator kinerja keluaran ke i

TKKi : target indikator kinerja keluaran ke i

M : jumlah indikator keluaran

- 4) Pengukuran Tingkat Efisiensi (NE), hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemanfaat sumber dana (anggaran) dalam menghasilkan suatu prosuk barang/jasa.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

PK : pencapaian keluaran

RAK : realisasi anggaran per keluaran

PAK : pagu anggaran per keluaran

RVK : realisasi volume keluaran

TVK : target volume keluaran

n : jumlah jenis keluaran

Nilai efisiensi (NE)

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE: Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Bobot dari kinerja aspek implementasi (W_I) sebesar 33,3% yang terdiri dari:

a) Bobot penyerapan anggaran (W_P) = 9,7%

b) Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (W_K) = 18,2%

c) Bobot pencapaian keluaran (W_{PK}) = 43,5%

d) Bobot efisiensi (W_E) = 28,6%

Nilai Kinerja Aspek Implementasi diukur dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Aspek Implementasi (I)} = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK})$$

Keterangan:

I : Nilai aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

W_P : bobot penyerapan anggaran

K : konsistensi antara perencanaan dan implementasi

W_K : bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK : pencapaian keluaran

W_{PK} : bobot pencapaian keluaran

NE : nilai efisiensi

W_E : bobot efisiensi

b. Pengukuran Aspek Manfaat

Aspek manfaat merupakan informasi yang bersisi perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan pemilik kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Pengukuran aspek implementasi diukur menggunakan pengukuran capaian hasil (CH).

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RKU_{ke i}}{TKU_{ke i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

CH : capaian hasil

RKU : realisasi indikator kinerja utama

TKU : target indikator kinerja utama

n : jumlah indikator kinerja utama

Nilai kinerja aspek manfaat memiliki bobot (W_{CH}) adalah 66,7%. Nilai kinerja aspek manfaat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Aspek Manfaat} = CH \times W_{CH}$$

Keterangan:

CH : capaian hasil

W_{CH} : bobot capaian hasil

Penilai adalah merupakan proses interpretasi atas keseluruhan capaian kinerja dari hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut. Penilaian Kinerja (tingkat keberhasilan program), dilakukan dengan menghitung Nilai Kinerja (NK) atas aspek implementasi dan aspek manfaat dikalikan dengan bobot kinerja dari masing-masing aspek. Seperti rumus berikut ini:

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

Keterangan :

NK: Nilai Kinerja

I : nilai aspek implementasi

W_I : bobot aspek implementasi

CH : nilai aspek manfaat

W_{CH} : bobot aspek manfaat

Hasil dari penilain kinerja selanjutnya dikelompokan kedalam katogori seperti berikut ini:

- 1) $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan sangat baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan cukup atau normal
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ dikategorikan sangat kurang

3. METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan metode Asosiasif. Penelitian Deskriptif yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yang akan menghasilkan informasi mengenai keadaan di Badan Pertanahan Nasional Reuplik Indonesia dilihat dari keadaan sebenarnya. Selanjutnya informasi tersebut akan diolah menjadi data dan dianalisis. Dalam proses akhirnya akan diambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Penelitian Asosiasif adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen dan variabel dependen.

3.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder tersebut didapat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Data yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian adalah data yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Keuangan, Surat Perintah Pencairan Dana, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk tahun anggaran 2010-2014.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai metode pengumpulan data yang digunakan:

- a. Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui literatur yang dapat berupa jurnal, surat kabar penelitian terdahulu, dan buku

- b. Dokumentasi adalah metode penelitian yang menggunakan dokumen-dokumen terdahulu. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Laporan Keuangan, Rencana Kerja Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dan Daftar Isian Pencairan Dana untuk tahun anggaran 2010-2014

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini adalah anggaran di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah terlaksana yaitu untuk tahun anggaran 2005-2015. maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2011-2015.

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat peranan pengaruh yang signifikan dari hipotesis yang telah dibuat yaitu “Pengaruh Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat dalam Pelaksanaan Anggaran Terhadap Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2010-2014” dengan langkah-langkah sebagai berikut :

3.6 Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Untuk mencari makna peranan variabel X terhadap Y secara parsial maka peneliti melakukan uji signifikansi terhadap hasil korelasi parsial tersebut menggunakan statistik uji “t” dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t_{hitung} = Nilai uji t
 r = Koefisien korelasi
 n = Ukuran sampel atau banyak data di dalam sampel

Agar dapat diambil kesimpulan apakah H_0 diterima atau ditolak, maka nilai t hitung dibandingkan dengan nilai kritis dari nilai distribusi t atau t tabel dengan derajat kebebasan (dk) $n-2$ dan taraf signifikansinya adalah $\alpha = 0,05$ (5%). Kriteria untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- Apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak terdapat pengaruh signifikan)
- Apabila $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$
- $> t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (terdapat pengaruh yang signifikan)

3.7 Uji Signifikansi (F)

Sugiyono (2012:192) menyatakan uji F digunakan untuk mengetahui apakah koefisien korelasi ganda dapat digeneralisasikan terhadap populasi atau tidak. Dalam

penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Aspek Implementasi (X1), dan Aspek Manfaat (X2), terhadap variabel nilai perusahaan (Y) secara simultan. Rumus uji signifikansi koefisien korelasi ganda adalah sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

- R² = koefisien korelasi ganda
 k = jumlah variabel independen
 n = jumlah anggota sampel

Kriteria untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Apabila - Fhitung < Ftabel atau Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak, Ha diterima
- Apabila - Fhitung > Ftabel atau Fhitung > Ftabel maka Ho diterima, Ha ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Aspek Implementasi

Tabel 1. Nilai Aspek Implementasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	Penyerapan Anggaran	Nilai Konsistensi	Pencapaian Keluaran	Nilai Efisiensi	Nilai Aspek Implementasi
2011	9,16%	17,03%	35,34%	-0,37%	61,17%
2012	9,46%	17,52%	41,67%	13,48%	82,13%
2013	8,89%	16,68%	41,04%	10,64%	77,25%
2014	8,79%	16,72%	40,73%	22,34%	88,58%
2015	8,65%	16,41%	43,90%	16,76%	85,72%

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, data diolah penulis

Aspek Manfaat

Tabel 2. Capaian Hasil (CH) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	CH	Nilai CH
2011	98%	65,67%
2012	99%	66,20%
2013	97%	64,89%
2014	97%	64,67%
2015	97%	64,96%

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, data diolah penulis

Nilai Kinerja

Tabel 3. Nilai Kinerja (NK) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	Nilai Capaian Hasil	Nilai Aspek Implementasi	Nilai Kinerja
2011	65,67%	20,37%	86,04%
2012	66,20%	27,35%	93,55%
2013	64,89%	25,72%	90,61%
2014	64,67%	29,50%	94,17%
2015	64,96%	28,55%	93,51%

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, data diolah penulis

4.2 Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji t

	One-Sample Test					
	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
Lower					Upper	
Aspek Implementasi	16,318	4	,000	78,94600	65,5136	92,3784
Aspek Manfaat	244,000	4	,000	97,60000	96,4894	98,7106

Sumber: Hasil Output SPSS 22.0

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan $\alpha = 0,05$ dan $df = n - 2 - 5 - 2 = 3$ yang menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,353. Hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3 Hubungan dan Pengaruh Aspek Implementasi terhadap Nilai Kinerja

Dari analisis korelasi didapat koefisien korelasi 0,986 dan bernilai positif. hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Aspek Implementasi dan Nilai Kinerja memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah. Jika Aspek Implementasi mengalami kenaikan maka Nilai Kinerja juga akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya. Nilai signifikan dari analisis korelasi yang telah dilakukan adalah sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 jadi dapat dikatakan bahwa korelasi tersebut signifikan. Dari analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai regresi sebesar 0,325. Hal ini menunjukkan bahwa jika Aspek Implementasi mengalami kenaikan satu satuan, maka Nilai Kinerja mengalami kenaikan yang sama yaitu sebesar 0,325 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap. Dari analisis regresi yang dilakukan didapat nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan regresi tersebut signifikan. Hasil penelitian uji t pihak kanan menunjukkan bahwa Aspek Implementasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel} = 16,318 > 2,353$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$). Nilai

positif menunjukkan pengaruh positif antara Aspek Implementasi terhadap Nilai Kinerja. Jika Aspek Implementasi mengalami kenaikan maka Nilai Kinerja juga mengalami kenaikan. Dari hasil uji t tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Aspek Implementasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja.

4.4 Pengaruh Aspek Manfaat Terhadap Nilai Kinerja

Dari analisis korelasi didapat koefisien korelasi sebesar 0,131 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Aspek Manfaat dan Nilai Kinerja memiliki hubungan yang sangat lemah dan berlawanan arah. Dimana jika Aspek Manfaat mengalami kenaikan maka Nilai Kinerja akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Nilai signifikan dari analisis korelasi yang telah dilakukan adalah sebesar 0,417. Nilai ini lebih besar dari 0,05 jadi dapat dikatakan bahwa korelasi tersebut tidak signifikan. Dari analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai regresi sebesar 0,662. Hal ini menunjukkan bahwa jika Aspek Manfaat mengalami kenaikan satu satuan, maka Nilai Kinerja mengalami kenaikan yang sama yaitu sebesar 0,325 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap. Dari analisis regresi yang dilakukan didapat nilai signifikan sebesar 0,014. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan regresi tersebut signifikan. Hasil penelitian uji t pihak kanan menunjukkan bahwa Aspek Manfaat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja ($t_{hitung} > t_{tabel} = 244 > 2,353$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$). Nilai positif menunjukkan pengaruh positif antara Aspek Manfaat terhadap Nilai Kinerja. Dimana jika Aspek Manfaat mengalami kenaikan maka Nilai Kinerja juga mengalami kenaikan. Dari hasil uji t tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Aspek Manfaat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja.

4.5 Pengujian Hipotesis Asosiatif (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Aspek Implementasi (X1) dan Aspek Manfaat (X2) terhadap Nilai Kinerja (Y) secara bersama-sama. Berikut ini merupakan hasil uji F:

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	45,909	2	22,954	1223,233	,001 ^b
Residual	0,038	2	0,019		
Total	45,946	4			

a. Dependent Variable: Nilai Kinerja

b. Predictors: (Constant), Aspek Manfaat, Aspek Implementasi

Sumber: Hasil Output SPSS 22.0

4.6 Pengaruh Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat secara bersama-sama terhadap Nilai Kinerja

Penelitian ini menggunakan Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat atas pelaksanaan anggaran sebagai variabel independen dan Nilai Kinerja sebagai variabel dependen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai F hitung sebesar 1223,233 dan nilai signifikannya sebesar 0,001. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 1223,233 lebih besar dari F tabel 19,00. Maka dapat disimpulkan Bahwa Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja. Dimana Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat mengalami kenaikan secara bersama-sama maka Nilai Kinerja juga akan mengalami kenaikan. Hal ini berlaku juga sebaliknya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek Implementasi dalam pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2011-2015. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,986 dan bernilai positif yang berarti bahwa Aspek Implementasi memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah dengan Nilai Kinerja. Aspek Implementasi memiliki pengaruh sebesar 32,5% terhadap Nilai Kinerja. Sedangkan sisanya sebesar 67,5% Nilai Kinerja dipengaruhi oleh faktor lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi Nilai Kinerja selain Aspek Implementasi adalah Aspek Manfaat dan Birokasi Politik. Berdasarkan uji t yang didapat Aspek Implementasi memiliki pengaruh terhadap Nilai Kinerja.
- b. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek Manfaat dalam pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Nilai Kinerja di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2011-2015. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,131 dan bernilai negatif yang berarti bahwa Aspek Manfaat memiliki hubungan yang sangat lemah dan berlawanan arah dengan Nilai Kinerja. Aspek Manfaat memiliki pengaruh sebesar 66,2% terhadap Nilai Kinerja. Sedangkan sisanya sebesar 33,8% Nilai Kinerja dipengaruhi oleh faktor lain. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi Nilai Kinerja adalah Aspek Manfaat dan Birokasi Politik. Berdasarkan uji t yang didapat Aspek Manfaat memiliki pengaruh terhadap Nilai Kinerja.
- c. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan didapat bahwa Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat dalam pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Nilai Kinerja di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2011-2015. Aspek Implementasi dan

Aspek Manfaat mempengaruhi Nilai Kinerja sebesar 99,9% sedangkan sisanya sebesar 0,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai 99,9% ini didapat dari Koefisien Determinasi sebesar 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa 99,9% Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat dapat menggambarkan Nilai Kinerja. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% merupakan faktor lain yang ada dalam Nilai Kinerja. Seperti perubahan peraturan pemerintah atau dapat dikatakan faktor birokrasi dan politik. Dari Nilai Kinerja sendiri dapat dilihat efektifitas dan efisiensi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan anggaran.

- d. Dikarenakan data dari Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat merupakan data non teknis maka penulis melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dilakukan agar data tersebut menjadi data normal atau data yang dapat diolah dalam sebuah penelitian. Awalnya data non teknis ini merupakan data yang tidak normal. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang telah ada maka data tersebut harus diuji kembali dengan asumsi klasik. Berdasarkan uji normalitas dan asumsi klasik data tersebut sudah terbukti normal dan dapat digunakan dalam penelitian atau dengan kata lain data tersebut dapat diolah lebih lanjut.

5.2 Rekomendasi

- a. Hasil penelitian ini adalah bahwa Nilai Kinerja di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2011-2015 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan sehingga diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat ditingkatkan kembali. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan peraturan pemerintah yang terjadi selama kurun waktu 2011-2015. Dimana dalam faktor birokrasi politik ini dapat mempengaruhi Nilai Kinerja meskipun hanya sebesar 0,1%. Dimana Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat dari pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat sendiri memegang peranan sebesar 99,9% dari Nilai Kinerja. Dimana untuk meningkatkan Nilai Kinerja Badan Pertanahan Nasional harus meningkatkan Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi dalam pelaksanaan anggaran yang mereka lakukan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan menambahkan variabel independen maupun dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014*. Jakarta: BPN RI, 2010.
- Basri, Ramlan. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol 1: Hal 202-212.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *PSAK 1 Revisi 2009: Penyajian Laporan Keuangan*. 2009. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Dien, Astria Nur Jannah. Tinangon, Jantjie. & Walandouw, Stanley. 2015. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA. Vol 3: Hal 534-541.
- Hasanah, Nurmala. & Fauzi, Achmad. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: In Media.
- Mahpud, Sujai. 2012. *Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian dan Lembaga*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol IX: Hal 1-11.
- Mahsun, Mohamad. Sulistiyowati, Firman. & Purwanugraha, Heribertus Andre. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: DPFE.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nuryaman. Chistina, Veronica. 2015. *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sagay, Brian. 2013. *Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA. Vol 1: Hal 1165-1174.
- Sarwono, Jonathan. 2015. *Rumus-rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Simanjuntak, Payaman J. 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Keuangan:**
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 “Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga”, diakses pada Tanggal 1 Februari 2016 dari www.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.02/2015 “Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran”, diakses pada Tanggal 1 Februari 2016 dari www.kemenkeu.go.id
- Internet:**
- Pemerintah Kota Banjar. 2016. “Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.” diakses Tanggal 5 Februari 2016 dari <http://bpkad.banjarkab.go.id> pada pukul 10:17
- Pemerintah Kota Wates. 2016. “Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana” diakses Tanggal 5 Februari 2016 dari <http://kppnwates.net> pada pukul 10:13